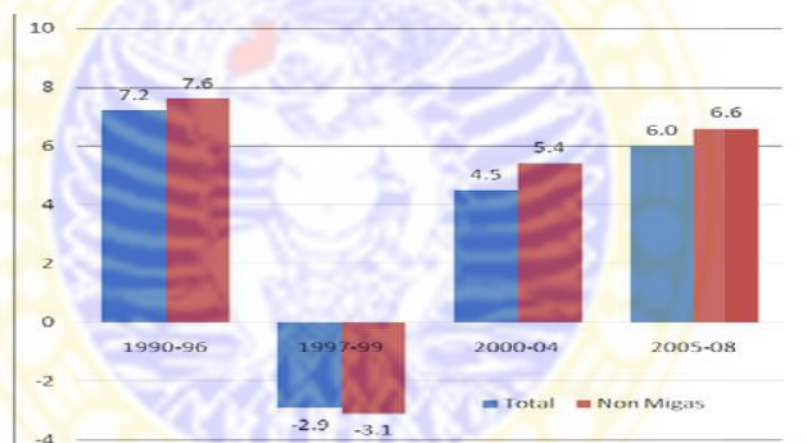


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia pasca terjadi krisis moneter sampai dengan tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang membaik. Hal ini ditunjukkan oleh grafik akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Percepatan pertumbuhan terutama dalam periode 2004 sampai dengan 2008.

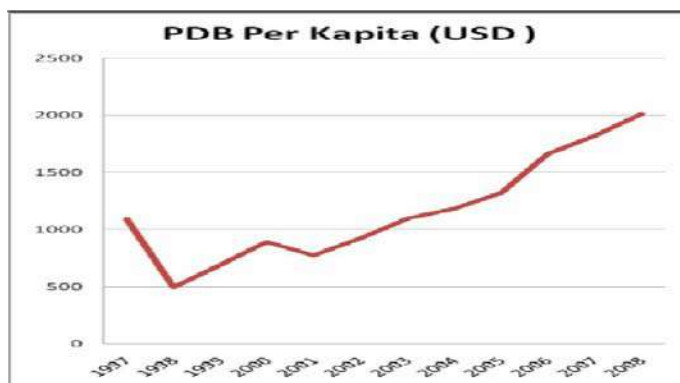
**Gambar I.1**  
**Akselerasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sesudah Krisis Ekonomi**



*Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2009:2)*

Akselerasi ini didukung pula dengan makin seimbangya sumber pertumbuhan ekonomi dimana investasi makin penting perannya, dan konsumsi masyarakat tetap terjaga tingkat pertumbuhannya. Berdasarkan grafik pertumbuhan Produk Domestik Bruto perkapita dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2009:2).

**Gambar I.2**  
**Perkembangan PDB Perkapita**



Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2013)

Keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi makro (nilai tukar dan inflasi), pendapatan per kapita Indonesia jika diukur dalam mata uang USD, meningkat 1,8 kali pada akhir 2008 dibandingkan dengan akhir 2004 dan melebihi USD 2.000 per kapita pada akhir 2008. Stabilitas ekonomi makro yang berkembang begitu baik pada dasarnya tidak akan lepas dari peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan wahana yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, tidak jarang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi *engine of growth* bagi suatu negara. Beberapa alasan penting yang memberikan Indikasi posisi penting Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut :

1. Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 4.8% tahun 2000 dimana usaha besar belum bangkit, banyak pakar memperkirakan karena kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Hasil Survey pada tahun 1998 ketika awal krisis terhadap 225.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah diseluruh Indonesia menunjukkan bahwa hanya 4% yang menghentikan bisnisnya, 64% tidak mengalami perubahan omzet, 31% persen omzetnya menurun, dan bahkan 1 persen justru berkembang.
3. Technical Assistant ADB pada tahun 2001 juga melakukan survey terhadap 500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Medan dan Semarang dan Hasilnya 78% Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak terkena dampak dari adanya krisis moneter (Arijanto, 2004)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh dalam menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, bahkan meningkatkan pendapatan nasional. Maka dari itu dukungan terhadap pertumbuhan UMKM berarti juga mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus terus dipertahankan karena memiliki peranan yang positif bagi perekonomian nasional maupun lokal.

Sejak tahun 2003 dengan diakuinya perdagangan bebas bagi negara-negara yang terdapat di Benua Asia atau disebut dengan Asean Free Trade Area (AFTA) dan North Asia Free Trade Area (NAFTA) menuntut adanya peningkatan kemampuan pada sektor bisnis pada berbagai skala dan mengukur kesiapan serta kekuatan yang dimiliki oleh sektor bisnis termasuk sektor usaha mikro. Beberapa tahun terakhir, banyak inisiatif ditujukan untuk pengembangan usaha kecil menengah (UMKM) oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga

swasta. Peran UMKM dalam perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah dan kecil (sektor riil), pemberantasan monopoli dan kartel ekonomi, dapat menciptakan struktur kemandirian ekonomi yang kuat, menarik investasi pengusaha luar negeri, menciptakan iklim kondusif bagi kewirausahaan dan terakhir pemisahan konstelasi (pemetaan kepetingan) ekonomi dengan politik, budaya, sosial. Hal ini sangat diperlukan guna menjamin ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

Peranan penting Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional yang mampu mengurangi pengangguran rupanya menghadapi berbagai permasalahan klasik. Permasalahan klasik tersebut menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2013 ada dua hal, yaitu masalah internal dan masalah eksternal:

1. Masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM; dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya.
2. Masalah eksternal yang biasa dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Perolehan legalitas formal hingga saat ini juga masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Bersamaan dengan masalah tersebut, UMKM juga menghadapi

tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah karena dengan melakukan kebijakan dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka pemerintah telah menyelesaikan dua masalah sekaligus yaitu memperkuat perekonomian lokal maupun nasional dan mengurangi jumlah pengangguran.

Atas segala permasalahan dalam pengembangan UMKM, harus ada kesadaran kolektif, bahwa saat ini produk-produk asing telah membanjiri pasar domestik Indonesia sampai ke tingkat daerah, khususnya Jawa Timur. Jika kita berkunjung dan berkeliling ke pusat-pusat pertokoan di Jawa Timur, maka kita akan dengan mudah menemukan berbagai jenis produk asing yang sejenis dengan produk hasil karya UMKM di Jawa Timur. Seperti produk mainan anak-anak, makanan dan buah-buahan, pakaian, sandal dan sepatu serta produk-produk lain. Produk asing sudah mengalir deras ke berbagai daerah, termasuk ke Jawa Timur.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah diterapkan diseluruh kota dan kabupaten di Indonesia, sangat berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara. Peran otonomi daerah sangatlah penting dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang bersifat lokal. Posisi kewenangan penuh pemerintah ini telah direspon positif oleh masyarakat daerah guna adanya kestabilan ekonomi, politik, budaya dan sosial yang bersifat permanen. Pengembangan ekonomi berbasis UMKM ini dapat diperoleh keuntungan ganda. Pertama, nilai strategisnya sektor ini dalam skema pertumbuhan ekonomi yang dikontribusikan oleh sektor manufaktur, bisnis eceran dan penyerapan tenaga

kerja. Kedua, memiliki potensi untuk menjadi lokomotif pemerataan. Selama ini perekonomian nasional diwarnai ketimpangan akibat tidak meratanya penyebaran dan perputaran uang yang terkonsentrasi di Jakarta dan kota besar lain. Kantong-kantong kemiskinan tumbuh dimana-mana dan disparitas ekonomi-sosial semakin melebar. Disinilah sektor UMKM sangat berperan mendorong tumbuhnya industri kecil, kerajinan rakyat, dan sektor informal maupun koperasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat berkepentingan untuk melakukan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tingkat provinsi, selain Undang-Undang No 20 tahun 2008 juga terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2007 tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi

landasan hukum program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Jawa Timur yaitu Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saat ini di Jatim menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur terdapat kurang lebih 8 juta unit pelaku usaha, di mana 6,8 juta unit usaha masuk kategori mikro, kecil, dan menengah. Dengan jumlah cukup besar ini, memiliki potensi yang besar dan menjanjikan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Lebih khusus lagi, dengan jumlah UMKM sebesar itu, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan menjanjikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Jatim. Maka kedepan sektor UMKM dipastikan akan menjadi penopang perekonomian Jatim. Karena itu, kepedulian dan keberpihakan pada UMKM ini harus digalakkan.

**Tabel I.1**

**Jumlah UMKM Tiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013**

NO	NAMA KAB/ KOTA	PENGUSAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	KAB. BANGKALAN	164.015	2.606	147	166.768
2	KAB. BANYUWANGI	280.204	15.269	1.233	296.706
3	KAB. BLITAR	242.838	11.362	1.422	255.622
4	KAB. BOJONEGORO	274.902	6.497	568	281.967
5	KAB. BONDOWOSO	168.041	3.928	409	172.378
6	KAB. GRESIK	157.977	9.569	847	168.393
7	KAB. JEMBER	418.164	4.669	1.318	424.151
8	KAB. JOMBANG	179.300	8.587	727	188.614
9	KAB. KEDIRI	243.969	7.001	523	251.493
10	KAB. LAMONGAN	243.602	8.535	597	252.734
11	KAB. LUMAJANG	187.444	8.254	748	196.446
12	KAB. MADIUN	142.381	3.952	229	146.562
13	KAB. MAGETAN	149.473	5.093	234	154.800
14	KAB. MALANG	387.607	24.372	2.537	414.516
15	KAB. MOJOKERTO	145.520	7.279	2.611	155.410
16	KAB. NGANJUK	196.351	4.546	566	201.463
17	KAB. NGAWI	181.573	2.884	855	185.312
18	KAB. PACITAN	178.402	2.616	97	181.115

19	KAB. PAMEKASAN	194.458	1.009	87	195.554
20	KAB. PASURUAN	237.353	10.564	885	248.802
21	KAB. PONOROGO	202.774	4.353	434	207.561
22	KAB. PROBOLINGGO	227.155	7.378	753	235.286
23	KAB. SAMPANG	193.082	1.838	295	195.215
24	KAB. SIDOARJO	154.892	14.836	1.536	171.264
25	KAB. SITUBONDO	150.635	5.678	414	156.727
26	KAB. SUMENEP	264.062	4.763	180	269.005
27	KAB. TRENGGALEK	140.497	2.716	242	143.455
28	KAB. TUBAN	215.147	8.111	740	223.998
29	KAB. TULUNGAGUNG	174.030	7.034	345	181.409
30	KOTA BATU	20.673	2.623	248	23.544
31	KOTA BLITAR	18.946	2.106	239	21.291
32	KOTA KEDIRI	25.877	3.066	363	29.306
33	KOTA MADIUN	20.287	2.084	291	22.662
34	KOTA MALANG	67.167	9.414	1.197	77.778
35	KOTA MOJOKERTO	16.059	1.324	97	17.480
36	KOTA PASURUAN	21.669	2.397	191	24.257
37	KOTA PROBOLINGGO	24.312	1.647	166	26.125
38	KOTA SURABAYA	222.856	31.867	6.039	260.762
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.533.694</b>	<b>261.827</b>	<b>30.410</b>	<b>6.825.931</b>

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang ikut berperan dalam menunjang perekonomian Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya Kabupaten Jombang menjadi Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Plus, dimana kawasan tersebut merupakan kawasan ekonomi unggulan Provinsi Jawa Timur yang kedepannya diharapkan dapat menjadi pelopor pemerataan ekonomi Jawa Timur (RTRW 2011-2031 Provinsi Jawa Timur). Wilayah yang masuk dalam pengembangan Gerbangkertosusila Plus meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan Selain itu wilayah Jombang memiliki akses yang tinggi terhadap kegiatan ekonomi Surabaya dan sekitarnya. Sebagai wilayah dengan peringkat 5

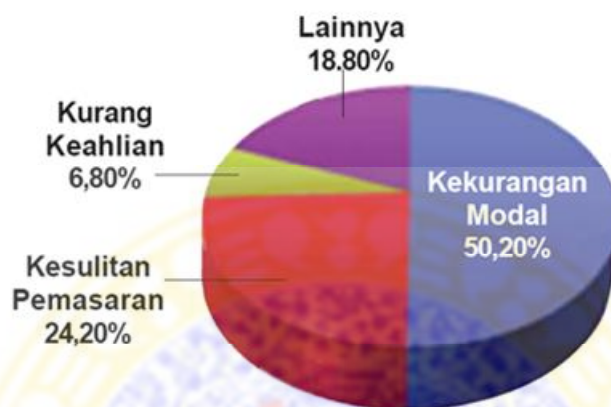


jumlah UMKM terbanyak diantara kab/kota wilayah pengembangan Gerbangkertosusila Plus, pemerintah Kabupaten Jombang merasa perlu untuk mengembangkan ekonomi lokalnya khususnya memaksimalkan peran UMKM agar mempunyai produk ekonomi unggulan sebagai penunjang ekonomi di kawasan pengembangan tersebut. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan UMKM membuat Kebijakan adanya pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM, dimana pemberdayaan ini merupakan implementasi dari Perda Provinsi Jawa Timur No 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM. Penelitian implementasi perda ini mengambil wilayah Kabupaten Jombang sebab Kabupaten Jombang selain masuk sebagai salah satu kawasan ekonomi unggulan untuk Provinsi Jawa Timur juga merupakan wilayah yang sedang berkembang dijalur akses ekonomi dari wilayah bagian Barat Provinsi Jawa Timur menuju pusat kegiatan Jawa Timur. Perkembangan ini patut untuk dikawal dan diarahkan dengan baik. Pemberdayaan yang dilakukan meliputi pembekalan dan pelatihan manajemen SDM UMKM, kerjasama pemerintah Kabupaten Jombang dengan pihak BUMD (Bank Jombang) dalam pemberian program kredit lunak ke pada UMKM, serta pemberian kesempatan para pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya dalam kegiatan pengenalan produk unggulan dan hal ini berlangsung sejak tahun 2010.

Adapun permasalahan UMKM di Jombang selama ini selain modal adalah masalah pemasaran. Hal ini ditunjukkan oleh data tahun 2006 dari 7.750 UMKM di Jombang dimana sebanyak 24,20 persen UMKM mengalami masalah pemasaran. Selain itu 6,80 persen adanya kurang mengusainya bidang usaha yang dilakukan, sebanyak 50,20 persen permasalahan UMKM adalah permasalahan modal.

Sehingga sekitar 49,80 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dikatakan belum mempunyai rencana pengembangan atau memperluas usahanya jangka waktu yang akan datang.

**Gambar I.3**  
**Permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Jombang**



*Sumber : Disperindagkop Kab. Jombang tahun 2007*

Segala permasalahan yang terjadi terhadap UMKM di Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya mengatasinya dengan Kebijakan Pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut berupaya memberdayakan para pelaku UMKM, sehingga dapat menciptakan UMKM mandiri, sehat, dan berdaya saing global. Data Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM tahun 2011 sekitar 26.600 UMKM dan menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang dapat semakin tumbuh tiap tahunnya.

**Tabel I.2**  
**Jumlah UMKM di Jombang**

UMKM	2009	2010	2011

Jumlah UMKM Berdaya	2.988	3.198	3.348
Jumlah UMKM Tidak/Kurang Berdaya	21.142	22.452	23.252
<b>Jumlah UMKM</b>	<b>24.130</b>	<b>25.650</b>	<b>26.600</b>

*Sumber : Laporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jombang Tahun 2011*

Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehingga program ini dapat dijadikan ajang promosi dan pengembangan lebih lanjut bagi para pelaku UMKM di Jombang.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini tertarik untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mengimplementasikan Kebijakan Provinsi Jawa Timur yaitu Perda No 6 Tahun 2011 dalam mengembangkann UMKM Jombang agar lebih dikenal dan diketahui masyarakat umum, khususnya para pelaku UMKM yang mempunyai produk makanan minuman dan kerajinan. Dan juga sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk memberdayakan UMKM sebagai kekuatan ekonomi daerah. Permasalahan ini diangkat untuk dituliskan dalam sebuah tesis yang berjudul **“Implementasi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011**

## **Tentang Pemberdayaan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jombang)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jombang melalui Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM ?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dari implemntasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Jombang melalui Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah berusaha untuk menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemberdayaan UMKM di kabupaten Jombang melalui Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara teoritis maupun praktis terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui implementasi kebijakan Pemberdayaan UMKM melalui program Pengenalan Produk sebagai wadah pemasaran UMKM, sehingga dapat dijadikan kajian bagi praktisi, peneliti, akademisi dan pemerintah untuk menambah khazanah pengetahuan dalam kebijakan publik. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Manfaat Akademis

- a) Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam kebijakan atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di bidang UMKM.
- b) Sebagai wacana dan rujukan bagi praktisi, peneliti, dan akademisi dalam menelaah kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam peningkatan ekonomi UMKM.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan keunggulan lokal sehingga dapat lebih mengembangkan potensi UMKM di daerah.
- b) Sebagai bahan diskusi bagi akademisi, praktisi dan peminat administrasi publik khususnya bidang kajian kebijakan publik.
- c) Memberikan sumbangan pemikiran kepada para ilmuwan dan praktisi tentang implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM.